

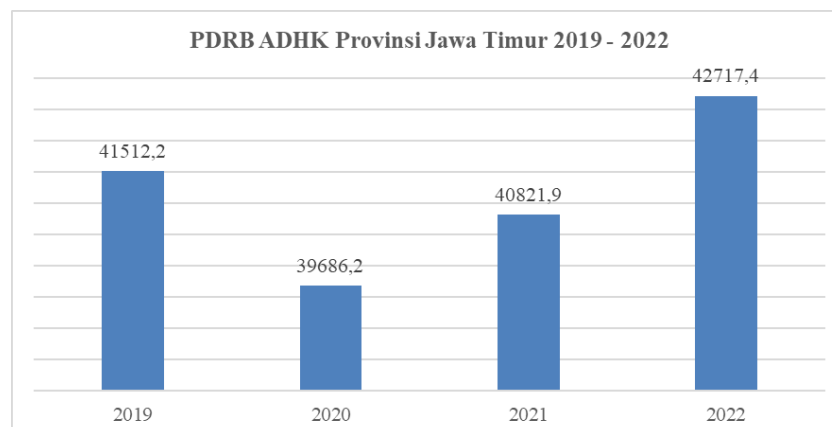
# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Sadono Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan berkembangnya kegiatan ekonomi di suatu daerah yang akan menyebabkan peningkatan kuantitas produksi daerah pada suatu periode. Hasil dari peningkatan produksi menyebabkan terjadi peningkatan pada pendapatan per kapita tiap daerah sehingga mengalami pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan pendapatan per kapita adalah cara untuk mencapai pembangunan ekonomi daerah, dimana hal ini menunjukkan peningkatan nilai tambah pendapatan dan meningkatnya kesejahteraan penduduk. Ada hubungan yang signifikan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi total pendapatan daerah dengan jumlah penduduknya. Pendapatan per kapita daerah dihitung melalui pembagian total pendapatan regional dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut selama periode waktu tertentu. Konsep pendapatan per kapita sangat relevan untuk mengukur nilai rata – rata pendapatan per individu dalam suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup serta kualitas hidup penduduk (Helly Suharlina, 2020).

**Gambar 1.1 PDRB Per Kapita ADHK Provinsi Jawa Timur (Ribu Rupiah) Tahun 2019 – 2022**



Sumber: BPS Jawa Timur, data diolah 2023

Pendapatan per kapita memainkan peran yang sangat penting bagi suatu wilayah. Secara teoretis, kenaikan pendapatan per kapita diikuti dengan peningkatan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Hukum Engel, jumlah uang yang dihabiskan untuk makanan dapat menunjukkan kualitas hidup yang layak dan tingkat kesejahteraan. Makanan sangat penting untuk kualitas sumber daya manusia, sehingga pemerintah harus memastikan ketersediaan makanan sebagai kebutuhan pokok. Setiap orang berhak untuk tidak kelaparan atau kekurangan makanan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menetapkan 17 tujuan yang ingin dicapai oleh penduduk dunia, dengan dua prioritas utama, yaitu menciptakan dunia tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan, serta mencapai ketahanan pangan (Safitriawati et al., 2020).

Dalam proses pengukuran tingkat kemiskinan, Direktorat Pengembangan Wilayah Bappenas (2015) menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara kemiskinan dan aspek pangan, begitu pula sebaliknya. Hubungan ini muncul karena pengukuran kemiskinan secara makro

bergantung pada jumlah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Direktorat Pengembangan Wilayah Bappenas (2015) menegaskan bahwa konsumsi pangan memiliki relevansi yang signifikan dengan kemiskinan, karena pada umumnya, rumah tangga miskin lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan daripada non-pangan (Ainistikmalia, Kharisma dan Budiono, 2022). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat dengan kerawanan pangan.

**Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2018 – 2023**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah 2023

Dari gambar grafik yang telah disajikan diatas, dapat dilihat terdapat lonjakan yang signifikan dari tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020, dengan peningkatan sebesar 11.09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 10.37%. Hal serupa terjadi pada tahun 2021, di mana tingkat kemiskinan meningkat sebesar 11.45%. Pada bulan Maret 2023, Provinsi Jawa Timur mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 4,18 juta orang, setara dengan 10.35% dari total penduduknya. Angka kemiskinan di Jawa Timur cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

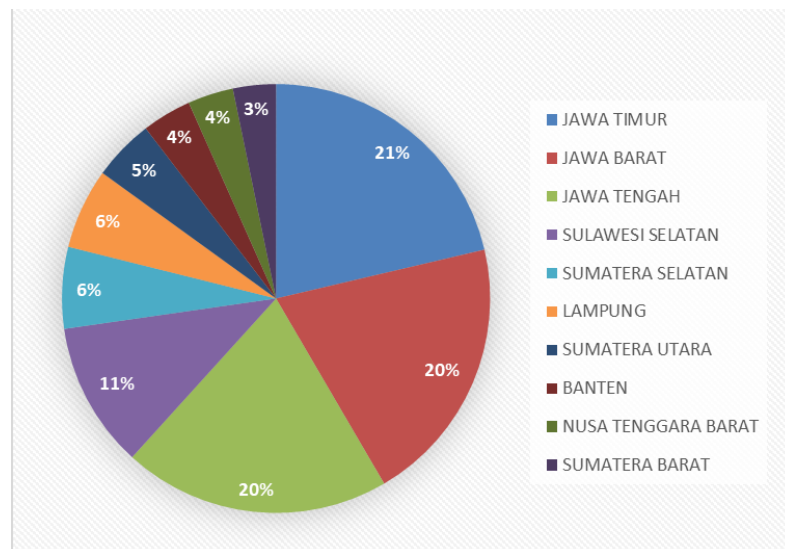
Faktor – faktor tertentu dapat memengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah diantaranya adalah populasi atau jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut (Nabibah dan Hanifa, 2023).

Masalah yang timbul akibat pertumbuhan populasi yang tidak terkendali berkaitan dengan berbagai aspek pembangunan dan mencakup isu – isu kesejahteraan manusia. Jumlah penduduk yang terus meningkat dapat menimbulkan permasalahan yang signifikan, terutama terkait dengan kesejahteraan penduduk, bahkan dapat mengakibatkan kondisi terjebak dalam kemiskinan (Nabi et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Azizah et al., (2018) mengungkap bahwa faktor pendorong tingginya angka kemiskinan terkait dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak sejalan dengan pertumbuhan faktor – faktor lainnya. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hajar (2020) membuktikan jika bertambahnya jumlah penduduk tidak memiliki dampak signifikan dengan tingkat kemiskinan. Interpretasi ini diambil dengan melihat fakta bahwa pertumbuhan penduduk seringkali diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Nabibah dan Hanifa, 2023).

Provinsi Jawa Timur telah dikenal sebagai salah satu pusat produksi padi terbesar di Indonesia selama empat tahun berturut – turut, mulai dari tahun 2020 hingga 2023. Provinsi ini secara konsisten memberikan kontribusi besar dalam lumbung pangan nasional. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2023), produksi padi sementara mencapai 9,591 juta ton gabah kering giling (GKG), setara dengan 5,538 juta ton beras. Produksi ini mengalami kenaikan sebesar 64,9

ribu ton GKG jika dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya, yaitu 9,526 juta ton GKG pada tahun 2022, sehingga Jawa Timur berada pada urutan pertama sebagai 10 provinsi penghasil produksi padi terbesar di Indonesia.

**Gambar 1.3 10 Provinsi Penghasil Padi Tertinggi di Indonesia Tahun 2023**



Sumber: BPS Indonesia, data diolah 2023

Di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur, beras sangat membantu ketahanan pangan. Provinsi Jawa Timur mengonsumsi beras dalam sebulan mencapai 6,30 kg dan 6,42 kg dalam hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret dan September 2021. Angka ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Tingginya tingkat konsumsi beras tersebut tentu perlu diimbangi dengan tersedianya stok komoditas beras di Jawa Timur. Stok komoditas beras tersebut dapat berasal dari produksi beras di dalam Provinsi Jawa Timur maupun berasal dari transaksi perdagangan dari wilayah lain. Sementara itu, berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021 hasil SUPAS 2015, rata – rata konsumsi rumah tangga di Jawa Timur

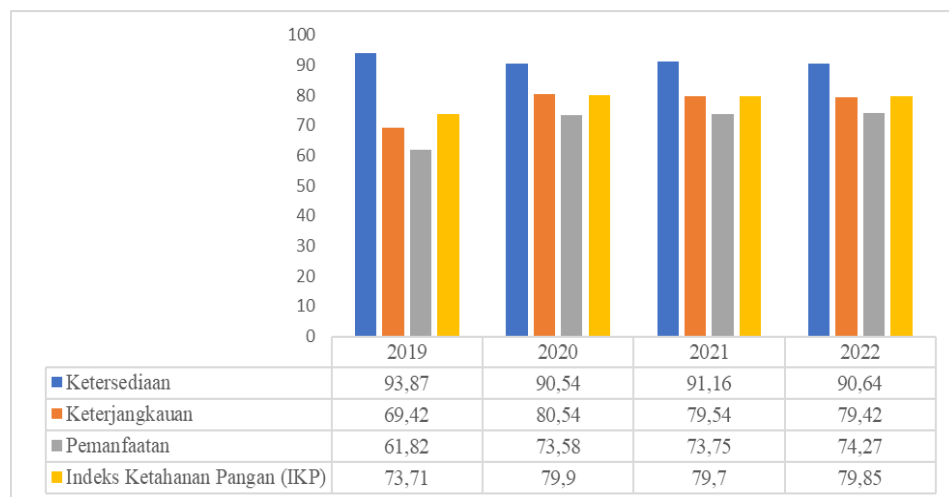
mampu dipenuhi oleh produksi beras di wilayah Jawa Timur dengan surplus sebesar 46,29 persen. Dibanding tahun 2020 persentase ini mengalami penurunan dimana pada tahun tersebut Jawa Timur mengalami surplus produksi beras sebesar 49,30 persen. Surplusnya produksi beras di Jawa Timur memungkinkan bagi Jawa Timur untuk melakukan perdagangan beras ke luar wilayahnya guna memenuhi kebutuhan daerah lain.

Perbedaan kapasitas produksi dan tingkat kebutuhan konsumsi beras yang bervariasi antar kabupaten/kota menciptakan perdagangan antar wilayah. Wilayah yang bukan merupakan sentra produksi beras mengimpor beras dari daerah – daerah yang memiliki surplus stok beras. Dampaknya, kegiatan perdagangan ini membentuk suatu rantai distribusi dari produsen beras hingga konsumen akhir. Dari rantai distribusi tersebut akan diperoleh pula Margin Perdagangan dan Pengiriman (MPP) dimana nilai yang terbentuk akan berbeda antar daerah. Survei pola distribusi tahun 2021 mencatat bahwa total nilai MPP komoditi beras wilayah Provinsi Jawa Timur mencapai 6,70 persen. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan total harga komoditas beras dari tingkat produsen hingga konsumen akhir sebesar 6,70 persen. Jika dibandingkan dengan total nilai MPP komoditi beras wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 19,22 persen, total nilai MPP pada tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pola distribusi beras wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2021 jauh lebih pendek dibanding tahun sebelumnya (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022).

Ketahanan pangan memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kualitas sumber daya manusia di wilayah

atau negara tersebut. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) digunakan sebagai instrumen pengukuran ketahanan pangan, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Indeks ini menjadi parameter penilaian yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah yang dihasilkan dari tiga dimensi utama, yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Penghitungan ini bergantung pada analisis data hasil Sensus Pertanian yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional (2023).

**Gambar 1.4 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2022**



Sumber: Badan Pangan Nasional Indonesia, data diolah 2023

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2022 berada pada posisi wilayah yang memiliki ketahanan pangan paling baik dalam kelompok 6 provinsi di Indonesia dengan rata – rata skor nilai indeks diatas 74.40, kecuali di tahun 2019 sebesar  $73.71 < 74.70$  berada pada kelompok 5 provinsi (Badan Pangan Nasional, 2023). Indikator yang menjadi pendorong tertinggi dari IKP yaitu Indeks Ketersediaan (IPs). Indeks ini dihitung berdasarkan ketersediaan produksi makanan dalam negeri, stok dan cadangan makanan, dan ekspor – impor. Hasil produksi

subsektor pertanian Provinsi Jawa Timur sangat baik serta mengalami peningkatan sehingga ketersediaan pangan domestik memadai dan dapat didistribusikan hingga luar daerah. Sementara itu, indikator dengan rata – rata peningkatan nilai rendah berada pada Indeks Pemanfaatan (IPm). Indeks ini dihitung melalui peningkatan dalam pola konsumsi, diversifikasi konsumsi, peningkatan gizi, keamanan, dan kualitas pangan. Tingkat prevalensi stunting di Provinsi Jawa Timur tahun 2022 turun dari tahun sebelumnya hingga mencapai 19,2 persen menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), di mana pada tahun 2021 tercatat tingkat prevalensi stunting pada balita sebesar 23,5 persen. Tiga kabupaten yang menjadi penyumbang utama terhadap tingginya prevalensi stunting di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, permasalahan stunting dan kemiskinan menjadi hal yang harus diwaspadai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, penyebabnya adalah tingginya jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan sehingga dapat memunculkan masalah dalam pertumbuhan ekonomi (Badan Pangan Nasional, 2023).

Ketahanan pangan menjadi semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama dengan munculnya pandemi Covid-19 yang menyoroti urgensi prioritas ketahanan pangan untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Proyeksi bonus demografi memperkirakan peningkatan jumlah penduduk hingga mencapai 9,8 miliar pada tahun 2050 dapat menyebabkan peningkatan permintaan untuk makanan, air, dan energi. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi terhadap ancaman terhadap ketersediaan pangan.



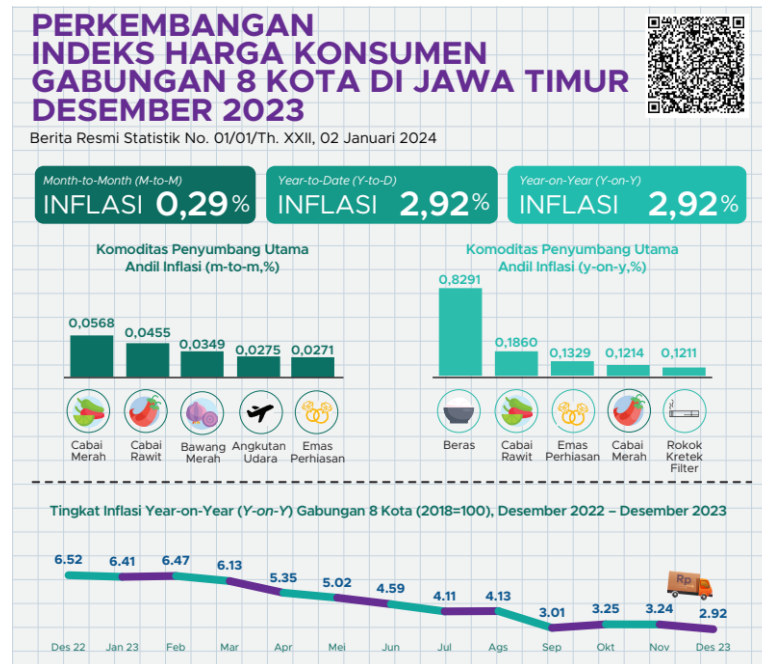
Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur juga dihadapkan pada tantangan serius lainnya, yaitu permasalahan konversi lahan pertanian. Lahan pertanian di Jawa Timur mengalami penurunan luas karena dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian seperti perumahan, industri, dan jalan tol. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian (2023), dari total luas lahan sawah sebesar 7,46 juta hektar pada tahun 2023, sekitar 659.200 hektar mengalami perubahan fungsi, dengan 179.539 hektar digunakan untuk infrastruktur maupun perumahan dan 479.661 hektar menjadi perkebunan. Konversi lahan pertanian dapat membawa dampak negatif pada kapasitas produksi pangan nasional dan ketersediaan sumber daya alam bagi para petani.

Stabilitas pasokan dan konsistensi harga pangan hingga saat ini tetap menjadi permasalahan yang sangat signifikan dan belum sepenuhnya teratasi secara optimal. Sebagian besar kebutuhan pangan nasional dipenuhi melalui produksi dalam negeri, sementara bagian lainnya bergantung pada impor. Meskipun produksi nasional beberapa komoditas pangan memadai, distribusinya tidak merata baik dari segi waktu maupun antar wilayah. Produksi komoditas pangan sebagian besar terfokus di wilayah sentra produksi, sejalan dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh setiap wilayah. Saat ini, produksi pangan masih dominan di pulau Jawa dan Sumatera, sehingga kedua wilayah tersebut seringkali memiliki surplus pangan, sementara wilayah lain yang bukan sentra produksi cenderung mengalami defisit pangan (Badan Pangan Nasional, 2023).

Ketersediaan pangan di wilayah yang mengalami kekurangan pasokan pangan memerlukan impor dari daerah surplus bahan pangan, sehingga pasokan pangan sangat tergantung pada kelancaran sistem transportasi dan keterhubungan antar wilayah. Selain itu, beberapa komoditas pangan memiliki sifat mudah rusak (*perishable*) dan memerlukan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan khusus, yang umumnya belum tersedia secara optimal. Kondisi ini sering menyebabkan fluktuasi dalam pasokan dan harga makanan, yang menyebabkan harga pangan menjadi tidak pasti bagi produsen dan konsumen (Badan Pangan Nasional, 2023).

Dalam lingkup yang lebih luas, fluktuasi pasokan dan harga pangan dapat memiliki dampak pada tingkat inflasi pangan. Inflasi *year-on-year* (y-o-y) di delapan kota di Provinsi Jawa Timur pada Desember 2023 mencapai 2,92 persen. Peningkatan harga tercermin dalam kenaikan sebesar 6,37% pada indeks kelompok pengeluaran utama, termasuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Di sisi lain, tingkat inflasi *month-to-month* (m-t-m) mencapai 0,29 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,59. Tingkat inflasi tahunan tertinggi tercatat di Sumenep sebesar 5,08% dengan IHK 120,82, sementara tingkat inflasi terendah tercatat di Banyuwangi sebesar 2,15% dengan IHK 114,50 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023).

**Gambar 1.5 Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Jawa Timur Tahun 2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Beras, cabai rawit, cabai merah, emas perhiasan, dan rokok kretek filter adalah beberapa komoditas yang paling banyak memberikan sumbangan inflasi tahunan per Desember 2023. Adapun komoditas yang memberikan sumbangan deflasi tahunan per Desember 2023, antara lain telur ayam ras, minyak goreng, bawang merah, tomat, sawi hijau, semangka, daging sapi, dan melon. Beberapa komoditas yang berkontribusi pada inflasi bulanan per Desember 2023 termasuk cabai rawit, cabai merah, bawang merah, angkutan udara, dan emas perhiasan. Selain itu, komoditas yang berkontribusi pada deflasi bulanan per Desember 2023 termasuk daging ayam ras, cumi-cumi, tongkol diawetkan, dan ayam hidup. Berdasarkan hal ini, baik dari sisi inflasi maupun deflasi tahunan atau bulanan didominasi oleh bahan pangan yang dibutuhkan termasuk beras, cabai rawit, bawang

merah, cabai merah, telur ayam ras, daging sapi, dan daging ayam ras (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023).

Keberhasilan pengendalian harga pangan akan sejalan dengan pengendalian laju inflasi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk mempertahankan stabilitas pasokan dan harga pangan diatur oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui “Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2023. Peraturan ini menetapkan Perpanjangan Penugasan kepada PT Jatim Grha Utama untuk melaksanakan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jawa Timur”. Lumbung Pangan diimplementasikan sebagai strategi untuk memastikan ketersediaan pasokan, mempertahankan stabilitas harga, dan mengelola distribusi barang kebutuhan pokok di wilayah Provinsi Jawa Timur. Melalui kegiatan lumbung pangan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatur dan mengawasi stabilitas harga pangan serta ketersediaan pangan secara regional hingga nasional (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023).

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari komponen pembentuk Indeks Ketahanan Pangan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Timur melalui tingkat kemiskinan sebagai variabel moderasi. Sebagai wilayah lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Timur telah mampu menopang ketahanan pangan secara regional serta mendukung daerah rawan pangan secara nasional melalui distribusi bahan pangan. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap makanan mempengaruhi konsumsi pangan, penelitian sebelumnya mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan diukur dari kecenderungan individu dalam mengonsumsi

bahan pangan atau non-pangan. Individu yang cenderung mampu membeli bahan non-pangan dinilai lebih sejahtera dibanding individu yang hanya mampu membeli bahan pangan sebagai kebutuhan pokok. Dengan demikian ketahanan pangan suatu daerah dapat dipengaruhi dengan adanya pendapatan yang diterima oleh suatu individu. Adanya peningkatan pendapatan dapat meningkatkan kemampuan daya beli (Safitriawati et al., 2020).

Menurut Safitriawati et al., (2020) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dipengaruhi oleh daya beli secara positif dan signifikan. Tingkat kemampuan daya beli ini erat kaitannya dengan pengetahuan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan produktif. Hasil dari kegiatan produktif ini menghasilkan output berupa barang dan jasa, yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan. Pendapatan yang tercipta melalui kegiatan ini menciptakan pengeluaran atau konsumsi. Pengaruh kemampuan daya beli masyarakat terlihat dalam kenaikan permintaan atas barang dan jasa, yang juga menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan daya beli masyarakat juga membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan. Sehingga dengan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, dengan tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar dilakukannya penelitian oleh penulis yang berjudul **“Analisis Pengaruh Ketahanan Pangan Terhadap**

## **Pertumbuhan Ekonomi Dengan Variabel Moderating Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan fenomena dan permasalahan diatas maka rumusan masalah pada proposal terkait Analisis Pengaruh Ketahanan Pangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Variabel Moderating Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kemiskinan dapat memperkuat pengaruh indeks ketersediaan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah tingkat kemiskinan dapat memperlemah pengaruh indeks ketersediaan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah tingkat kemiskinan dapat memperkuat pengaruh indeks keterjangkauan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah tingkat kemiskinan dapat memperlemah pengaruh indeks keterjangkauan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
5. Apakah tingkat kemiskinan dapat memperkuat pengaruh indeks pemanfaatan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?

6. Apakah tingkat kemiskinan dapat memperlemah pengaruh indeks pemanfaatan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari proposal Analisis Pengaruh Ketahanan Pangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Variabel Moderating Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah tingkat kemiskinan dapat memperkuat pengaruh indeks ketersediaan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui apakah tingkat kemiskinan dapat memperlemah pengaruh indeks ketersediaan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
3. Mengetahui apakah tingkat kemiskinan dapat memperkuat pengaruh indeks keterjangkauan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
4. Mengetahui apakah tingkat kemiskinan dapat memperlemah pengaruh indeks keterjangkauan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
5. Mengetahui apakah tingkat kemiskinan dapat memperkuat pengaruh indeks pemanfaatan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

6. Mengetahui apakah tingkat kemiskinan dapat memperlemah pengaruh indeks pemanfaatan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Penelitian ini secara komprehensif menganalisis peran tingkat kemiskinan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan ketahanan pangan yang diukur dari segi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan serta mengidentifikasi komponen ketahanan pangan yang secara dinamis berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sampel penelitian pada 30 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan menggunakan data dan analisis tentang tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur, penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja sektor pertanian dan ekonomi dalam mencapai peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur untuk menyusun rencana strategis bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan serta perencanaan pembangunan wilayah Provinsi Jawa Timur secara sinergi dalam perbaikan sumber daya manusia melalui pangan. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan acuan atau referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya.